E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://epaper.dpr.go.id

Judul : Minyak Goreng tidak Boleh Dipengaruhi Harga CPO Dunia
Tanggal : Jumat, 04 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

MI_04_02_22_h10_minyak_goreng

Minyak Goreng tidak Boleh Dipengaruhi Harga CPO Dunia

DIREKTUR Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan pemerintah tengah mengupayakan agar harga minyak goreng dalam negeri tidak lagi bergantung pada harga crude palm oil (CPO) internasional.

“Jadi penyebab utama yang harus diperbaiki ialah harga minyak goreng domestik melepaskan diri dari ketergantungan harga CPO internasional. Silakan (harga CPO) naik berapa pun, itu berkah bagi eksportir kita,” kata Oke pada diskusi publik yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara virtual, kemarin

Hal tersebut disampaikan terkait dengan melambungnya harga minyak goreng di dalam negeri ketika harga CPO internasional melonjak tinggi, padahal Indonesia merupakan salah satu penghasil CPO terbesar di dunia.

Oke memaparkan pemerintah mengakui adanya sistem dari kebijakan terkait dengan harga minyak goreng dalam negeri yang terlalu melepas ke mekanisme perdagangan. Dengan demikian, pada situasi tertentu, yakni ketika datangnya pandemi covid-19, baru disadari kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan.

“Pemerintah yang selama ini adem ayem, ternyata harga minyak goreng domestik tidak boleh ketergantungan dengan harga CPO internasional. Posisinya saat ini tidak bisa menunggu lama, harus segera ditindaklanjuti,” ujar Oke.

Untuk itu, pemerintah mempertimbangkan beberapa hal dalam mengambil kebijakan untuk menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Pertama, lanjut Oke, pemerintah tidak ingin mengganggu kesejahteraan petani sawit. Kemudian, pemerintah juga berupaya menjaga tatanan perdagangan internasional, yakni produk sawit merupakan kontributor ekspor kedua terbesar yang menyumbang devisa bagi Indonesia. Terakhir, pemerintah berupaya menjaga pasokan dan keterjangkauan harga minyak goreng untuk masyarakat Indonesia.

Melambungnya harga minyak goreng di dalam negeri juga mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil para pemain besar perusahaan minyak goreng untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan kartel produk minyak goreng hari ini, Jumat (4/2).

“Kita menemukan empat pemain besarnya. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut mulai besok oleh KPPU akan dipanggil terkait dengan indikasi kartel,” kata Ketua KPPU Ukay Karyadi pada diskusi yang sama.

Ukay memaparkan alasan adanya indikasi kartel terkait dengan melonjaknya harga minyak goreng beberapa waktu lalu, dengan menyebut terdapat sinyal-sinyal praktik kartel. (Ant/E-3)